KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fraksi Penolak Hak Angket tak Kirim Anggota
Tanggal : Rabu, 03 Mei 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

Fraksi Penolak Hak Angket tak Kirim Anggota

● FAUZIAH MURSID, ALI MANSUR

Keputusan rapat paripurna diminta ditinjau ulang.

JAKARTA — Sejumlah fraksi yang menolak pengajuan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengirimkan anggota fraksinya di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, meski Rapat Paripurna DPR RI sudah memutuskan menyetujui pengajuan hak angket pada KPK.

Fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak akan mengirim nama anggota fraksinya. Juru bicara Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, hal ini sesuai dengan sikap Fraksi Gerindra yang sejak awal menolak hak angket. "Ya, sebagai penolak tentu tidak akan kirim anggota ke pansus," kata Sodik, Selasa (2/5).

Namun, Sodik mengatakan, Gerindra masih akan mempertimbangkan secara bulat keputusannya untuk tidak akan mengirim utusan ke pansus. Sebab, Gerindra menilai jika tidak adanya anggota Fraksi Gerindra dalam pansus itu, membuat proses pansus tak dapat terpantau.

Fraksi PKS juga tidak akan mengirimkan anggotanya dalam Pansus KPK. Sekretaris Fraksi PKS Sukamta mengatakan, fraksinya konsisten untuk menolak pengajuan hak angket terhadap KPK. Meskipun sikap resmi akan disampaikan setelah fraksi berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

"Kami tidak akan kirim, kami tetap konsisten tidak setuju dengan hak angket ini," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR, Sukamta.

Fraksi PPP ikut tidak akan mengirim nama untuk masuk anggota Pansus Hak Angket KPK. Sekretaris Fraksi PPP Amir Uskara menegaskan, keputusan ini sesuai dengan sikap fraksi yang menolak pengajuan hak angket. Namun, PPP mengungkapkan, fraksinya tidak akan mengirim nama jika tanpa PPP, pansus hak angket tidak kuorum.

"Kalau tanpa PPP pansus tidak kuorum, kami tidak akan mengirimkan anggota di pansus karena kami memang tidak setuju dengan angket ini," kata Amir.

Amir menambahkan, jika Pansus Angket KPK tetap kuorum tanpa kehadiran anggota PPP, partai berlambang Ka'bah tersebut tetap akan mengirimkan anggotanya dalam pansus. PPP masih akan melihat dinamika perkembangan pengajuan hak angket. Jika melihat kondisi saat ini, fraksi yang menolak adalah Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, dan PPP.

Fraksi PKB juga menegaskan, tidak akan mengirim nama anggotanya dalam pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan DPR RI. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan menegaskan sikap PKB terhadap pengajuan angket ini.

"Tidak (kirim anggota ke pansus)," kata Daniel.

Daniel menambahkan, fraksi akan meminta anggotanya yang telah menandatangani hak angket untuk mencabut dukungan. Nama anggota Fraksi PKB Rohani Vanath masuk dalam daftar anggota DPR yang ikut menandatangani hak angket. Namun, Rohani Vanath diklaim sudah mencabut tanda tangannya dalam daftar pengusul.

Sementara itu, PAN yang menolak pengajuan hak angket masih mempertimbangkan untuk menempatkan anggotanya dalam pansus. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, kalau dengan cara tidak mengirim anggotanya dapat membatalkan hak angket, PAN tidak akan mengirim. Namun, jika tanpa PAN hak angket tetap berjalan, partai berlambang matahari terbit itu tetap akan memasukkan nama anggota sebagai pemantau.

"Kalau memang tidak mengirim (perwakilan) bisa menyelesaikan masalah, ya kami tidak kirim. Kalau tidak menyelesaikan masalah, ya kita tarung di dalam," tutur dia.

Surat keberatan

Fraksi PKS melayangkan surat keberatan terkait hasil sidang paripurna yang berlangsung pada Jumat (28/4) lalu. Dalam surat itu mereka menyatakan pengesahan hak angket seharusnya tidak dilakukan oleh pimpinan rapat secara sepihak.

Dalam surat bernomor 214/EXT-FPKS/DPRRI/V/2017 itu Fraksi PKS DPR RI juga menyampaikan keluhannya pada saat paripurna kemarin. Anggota Fraksi PKS yang diberi mandat tidak mendapat kesempatan menyampaikan pendapat fraksi.

"Fraksi PKS DPR RI menyampaikan keberatan dan mohon untuk ditinjau ulang kembali terhadap keputusan rapat paripurna, Jumat, 28 April 2017, tentang Usulan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi," tulis PKS dalam surat itu.

Surat itu sendiri ditujukan kepada Ketua DPR RI dan ditembuskan kepada seluruh Wakil Ketua DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi DPR RI, Sekjen DPR RI, Deputi Persidangan Setjen DPR RI, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI, Kepala Biro Persidangan I dan II Setjen DPR RI, dan Kabagset Bamus Setjen DPR RI. Kemudian, surat ini ditandatangani oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta. ■ ed: agus raharjo